

RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN									
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengolahan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Tri I	0.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	Nilai	Tri I	25.00	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tri I	25.00				
					Tri II	0.00				Tri II	25.00			Tri II	25.00				
					Tri III	79.50				Tri III	25.00			Tri III	25.00	Tri III	25.00		
					Tri IV	79.50				Tri IV	25.00			Tri IV	25.00	Tri IV	25.00		
					2. Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Nilai				Tri I	25.00			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tri I	25.00		
										Tri II	25.00					Tri II	25.00		
										Tri III	25.00					Tri III	25.00		
										Tri IV	25.00					Tri IV	25.00		
					3. Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	%				Tri I	25.00			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Prilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	Tri I	25.00		
										Tri II	25.00					Tri II	25.00		
										Tri III	25.00					Tri III	25.00		
										Tri IV	25.00					Tri IV	25.00		
					4. Administrasi Umum Perangkat Daerah									4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perkantoran	Tri I	25.00		
																Tri II	25.00	Tri II	25.00
																Tri III	25.00	Tri III	25.00
																Tri IV	25.00	Tri IV	25.00
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Tri I	0.00		
																Tri II	0.00	Tri II	100.00
																Tri III	100.00	Tri III	100.00
																Tri IV	0.00	Tri IV	0.00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tri I	25.00												
						Tri II	25.00	Tri II	25.00										
						Tri III	25.00	Tri III	25.00										
						Tri IV	25.00	Tri IV	25.00										
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah				7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Tri I	25.00												
						Tri II	25.00	Tri II	25.00										
						Tri III	25.00	Tri III	25.00										

										Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tri IV	25.00						
Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase proyeksi Tingkat Kesempatan Kerja	%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0.00 0.00 0.00 95.72	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Persentase Provinsi/Kabupat en/Kota yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Makro 2. Persentase Perusahaan yang menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0.00 0.00 0.00 75.00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1. Persentase pemenuhan data perencanaan tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota 2. Persentase peningkatan pengetahuan SDM Kabupaten/Kota	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25.00 25.00 25.00 25.00				
		Meningkatnya pembangunan kawasan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi	Persentase perkembangan kawasan transmigrasi	%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0.00 0.00 0.00 49.48	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Jumlah lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0.00 0.00 0.00 100.00	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Data dan Informasi calon areal pengembangan kawasan transmigrasi	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25.00 25.00 25.00 25.00				
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0.00 0.00 0.00 100.00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (KSAD, Kelayakan Lokasi, Verifikasi dan Penyuluhan Calon TPS, dan Monitoring dan Evaluasi)	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25.00 25.00 25.00 25.00				
							Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dilatih dapat lebih mandiri	%	Tri I Tri II Tri III Tri IV	0.00 0.00 0.00 100.00	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1. Persentase meningkatnya pengetahuan dan keterampilan transmigran 2. Persentase SP yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan	Tri I Tri II Tri III Tri IV	25.00 25.00 25.00 25.00				
	Meningkatnya keterampilan/ko mpetensi tenaga						Tingkat produktifitas tenaga kerja	Rp	Tri I Tri II Tri III	83.2 0.00 0.00	Program	Persentase	%	Tri I Tri II Tri III	0.00 0.00 0.00	Pelaksanaan	1. Persentase meningkatnya	Tri I	25.00
											Pelatihan Kerja	pencari kerja				Latihan Kerja	keterampilan/kompetensi tenaga	Tri II	25.00
											dan Produktivitas	terlatih yang				Berdasarkan	kerja/UKM/KUM/Disabilitas	Tri III	25.00

		kerja, pelaku usaha, dan produktivitas tenaga kerja			Tri IV	0.00	Tenaga Kerja	mendapatkan pekerjaan		Tri IV	87.00	Klaster Kompetensi	2. Persentase meningkatnya kompetensi instruktur	Tri IV	25.00
								Persentase Tenaga Kerja dapat Berwirausaha	%	Tri I	0.00	Konsultasi	Persentase meningkatnya produktivitas UKM	Tri I	25.00
										Tri II	0.00	Produktivitas		Tri II	25.00
										Tri III	0.00	pada Perusahaan		Tri III	25.00
										Tri IV	100.00	Menengah		Tri IV	25.00
												Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	1. Tersedianya Data dan Informasi Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Tri I	25.00
													2. Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Balai Pelatihan Kerja	Tri II	25.00
														Tri III	25.00
														Tri IV	25.00
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	Tri I	5000	Program	1. Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	Tri I	0.00	Pelayanan Antar	Persentase pemenuhan pelayanan antar kerja	Tri I	25.00
					Tri II	7500	Penempatan			Tri II	0.00	Kerja Lintas		Tri II	25.00
					Tri III	10000	Tenaga Kerja			Tri III	0.00	Daerah		Tri III	25.00
					Tri IV	12282		2. Persentase daya serap tenaga kerja	%	Tri IV	9.60	Kabupaten/Kota		Tri IV	25.00
										Tri I	0.00	Pengelolaan	Tersedianya data dan informasi	Tri I	25.00
										Tri II	0.00	informasi Pasar	pasar dan bursa kerja di	Tri II	25.00
										Tri III	0.00	Kerja	Kabupaten/Kota	Tri III	25.00
										Tri IV	63.60			Tri IV	25.00
												Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	1. Persentase meningkatnya kompetensi CPMI/PMI	Tri I	25.00
													2. Persentase meningkatnya pelayanan dan penanganan PMI Terpadu	Tri II	25.00
														Tri III	25.00
														Tri IV	25.00
		Meningkatnya hubungan industrial yang	Persentase kenaikan upah	%	Tri I	0.00	Program	: 1. Persentase Perusahaan yang menerapkan	%	Tri I	0.00	Pengesahan	Tersedianya Data dan Informasi	Tri I	25.00
					Tri II	0.00	Hubungan			Tri II	0.00	Peraturan	pelaksanaan Syarat-syarat Kerja	Tri II	25.00
					Tri III	0.00	Industrial			Tri III	0.00	Perusahaan dan	di Perusahaan	Tri III	25.00

		harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam rangka terwujud kelangsungan berusaha dan bekerja			Tri IV	1.55		peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Industrial		Tri IV	63.75	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		Tri IV	25.00
								2. Persentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek		Tri I	0.00	Pencegahan dan	1. Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan yang dapat dicegah dan diselesaikan	Tri I	25.00
										Tri II	0.00	Penyelesaian	Hubungan Industrial Perusahaan	Tri II	25.00
										Tri III	0.00	Perselisihan	yang dapat dicegah dan diselesaikan	Tri III	25.00
										Tri IV	47.68	Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2. Fasilitasi Tim LKS Tripartit dalam Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Tri IV	25.00
												Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1. Falisitasi dewan pengupahan dalam menetapkan UMP/UMK	Tri I	25.00
													2. Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial	Tri II	25.00
														Tri III	25.00
														Tri IV	25.00
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	1. Persentase kepatuhan penerapan norma	%	Tri I	4.32	Program	1. Persentase	%	Tri I	0.00	Penyelenggaraan	1. Persentase pemeriksaan	Tri I	25.00
					Tri II	6.48	Pengawasan	Penurunan resiko		Tri II	0.00	Pengawasan	norma ketenagakerjaan di	Tri II	25.00
					Tri III	7.56	Ketenagakerjaan	kecelakaan kerja		Tri III	0.00	Ketenagakerjaan	perusahaan	Tri III	25.00

		norma kerja dan norma K3	ketenagakerjaan		Tri IV	9.47		dan penyakit akibat kerja		Tri IV	55.87		2. Persentase permasalahan hukum yang tertangani 3. Persentase pelayanan K3 di perusahaan 4. Tertib administrasi pelayanan dan pembinaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja	Tri IV	25.00
			2. Persentase Pembinaan dan Pelayanan Norma K3	%	Tri I	4.31		2. Persentase penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan	%	Tri I	25.00				
					Tri II	5.62				Tri II	25.00				
					Tri III	6.27				Tri III	25.00				
					Tri IV	8.12				Tri IV	25.00				

KEPALA DINAS



Dr. JAYADI NAS, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710501 199803 1 004